



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pemprov Anggarkan Beli Jeep Senilai Rp 4,6 Miliar

► Untuk Pj Gubernur dan Ketua DPRD

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,3 Miliar yang diperuntukkan membeli mobil Jeep untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Belanja modal kendaraan dinas operasional itu terdapat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP). Dalam Sirup LKPP itu, anggaran tersebut tertulis untuk satu unit mobil. Kapasitas mobil tersebut tertulis 4.200 cc.

"Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah. Lokasi pekerjaan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur," tulis keterangan dalam situs LKPP itu, dikutip pada Kamis (2/3/2023).

"Volume pekerjaan 1 unit. Uraian pekerjaan pengadaan kendaraan dinas bermotor perseorangan Pj Gubernur," demikian keterangan lanjut di LKPP.

Pengadaan ini masuk pada alokasi anggaran UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Selain untuk Heru Budi, pengadaan mobil Jeep un-

Bukan, nggak mobil Jeep. Kalau gubernur itu nanti listrik

**Reza Pahlevi
Kepala BPAD
DKI Jakarta**

tuk kendaraan dinas juga diperuntukkan bagi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Total anggarannya pun sama, yakni Rp 2,3 Miliar.

Paket pengadaan Jeep kepala daerah dan ketua dewan di ibu kota ini dibuat secara terpisah, termasuk pemilihan belanja.

Pengadaan Jeep untuk Heru dilakukan dengan sistem tender, sementara Prasetyo melalui e-purchasing.

"Volume pekerjaan 1 unit. Uraian pekerjaan pengadaan kendaraan dinas bermotor perseorangan Ketua Dewan," berikut bunyi detail paket pembelian Jeep untuk kendaraan dinas Prasetyo.

Pemprov DKI menjadwalkan pemilihan penyedia Jeep untuk Heru dan Prasetyo dilakukan mulai Februari hingga Maret 2023. Adapun pelaksanaan kontrak dilakukan pada

Maret hingga April 2023 sebelum nantinya dilakukan pemanfaatan hasil pengadaan kendaraan dinas listrik ini.

Ganti Mobil Listrik

Sementara itu BPAD DKI Jakarta menyanggah bahwa pengadaan kendaraan dinas untuk gubernur adalah mobil dengan jenis Jeep.

"Bukan, enggak mobil Jeep. Kalau gubernur itu nanti listrik," ujar Kepala BPAD DKI Jakarta, Reza Pahlevi saat dihubungi, Kamis (2/3/2023).

Reza menjelaskan bahwa saat ini tengah menunggu perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlebih dahulu untuk penyediaan mobil listrik.

Sembari menunggu regulasi tersebut, Reza menyampaikan berdasarkan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) memang akan membeli kendaraan dinas.

"Ini sembari menyiapkan Perkada. Nah, kami sedang menggeser satu pasal untuk mobil listriknya itu," kata Reza.

Reza pun masih enggan untuk menjawab saat ditanya kemungkinan pengadaan dua jenis kendaraan (Jeep dan mobil listrik).

Hal tersebut disinyalir karena masih menunggu revisi Perkada selesai terlebih dahulu, baru bisa memutuskan tindakan yang akan dilakukan. (m36/Kompas.com)